

Kompeten.

(3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif, (2) Peningkatan tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang akan dicapai dalam (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Bersih dan Efektif, (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan 2015-2019.

Sebagai Auditor berkelas dunia, Perwakilan BPKP Provinsi Papua berperan membantu Pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/ daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN

*Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional*

**Visi BPKP** adalah *"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk*

2016.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang akan dicapai dan rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja di tahun



2. Sasaran program 2 : "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI pada korporasi" dengan target *outcome* indikator kinerja utama: (1) Persentase

kepada aparat penegak hukum tahun 2016  
 keberhasilan pencapaian IKU penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian  
 91,43% sehingga capaian *outcome* menjadi 152,38%. Hal ini menunjukkan  
 Aparat Penegak Hukum Tahun 2016 sebesar 60%. Realisasi *outcome* sebesar  
 tahun 2016 dan (3) Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada  
 manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program strategis  
 sebesar 72,70%. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya perbaikan tata kelola  
 Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi sebesar 100%. Capaian *outcome*  
 tahun 2016, (2) Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan  
 manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional  
 51,49%. Hal ini menunjukkan belum berhasilnya perbaikan tata kelola  
 Realisasi *outcome* sebesar 23,17% sehingga capaian *outcome* menjadi sebesar  
 Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Tahun 2016 sebesar 45%.  
 indikator kinerja utama: (1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan  
 pengendalian intern pengelolaan program nasional" dengan target *outcome*  
 1. Sasaran program 1 : "Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan

Sasaran Program dan IKU tersebut di atas, sebagai berikut:  
 khususnya terhadap IKU yang menyimpang dari targetnya. Realisasi pencapaian  
 capaian Sasaran Strategis. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis,  
 Program dan sepuluh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang paling mempengaruhi  
 nilai tambah bagi *stakeholders* dan pengukuran capaian kinerja empat Sasaran  
 menggambarakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Papua dalam memberikan  
 sasaran strategis. Keberhasilan capaian sasaran program diukur IKU yang  
*outcome* dan *output* serta penetapan IKU sebagai dasar pengukuran capaian  
 sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa  
 Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah. Perumusan  
 korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan meningkatnya  
 meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah dan  
 Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional,  
 Provinsi Papua telah merumuskan tiga sasaran strategis, yaitu meningkatnya  
 Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2016 Perwakilan BPKP